

KEK

ISSN 1410-3249

No. Akreditasi : 467/AU3/P2MI-LIPI/08/2012

Vol 17 No 1, Maret 2013

KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN

■ **Revitalisasi Investasi Pengembangan Energi Panas Bumi di Indonesia**

■ **Analisis Kinerja Program Kredit Usaha Rakyat dalam Perspektif Pemangku Kepentingannya**

■ ***The Impact of Taxes on Production on Income Distribution in Indonesia***

■ **Analisis Kemampuan Pendanaan Pemerintah Daerah dalam Rangka Memberikan Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin**

■ **Pengaruh Defisit Anggaran terhadap Defisit Transaksi Berjalan di Indonesia**

Kaj. Eko. & Keu.	Vol. 17	No. 1	Maret 2013	Halaman : 1 - 106	ISSN 1410-3249
------------------	---------	-------	------------	-------------------	----------------

ISSN 1410-3249

KAJIAN

EKONOMI KEUANGAN



Pusat Kebijakan Ekonomi Makro
Badan Kebijakan Fiskal
Kementerian Keuangan RI

■ Ragimun (Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan)
**Revitalisasi Investasi Pengembangan Energi Panas Bumi
di Indonesia**

■ Mohamad Nasir (Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan)
**Analisis Kinerja Program Kredit Usaha Rakyat dalam Perspektif
Pemangku Kepentingannya**

■ Kunta Nugraha (Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan)
The Impact of Taxes on Production on Income Distribution in Indonesia

■ Sri Lestari Rahayu (Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan)
**Analisis Kemampuan Pendanaan Pemerintah Daerah dalam
Rangka Memberikan Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin**

■ Muhammad Afdi Nizar (Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan)
**Pengaruh Defisit Anggaran terhadap Defisit Transaksi Berjalan
di Indonesia**

KATA SAMBUTAN

Kami panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terbitnya Kajian Ekonomi dan Keuangan edisi ini ke hadapan pembaca sekalian. Pada edisi ini, kami menyajikan berbagai topik yang berkaitan dengan analisis dan dampak kebijakan publik di bidang ekonomi dan keuangan negara.

Kajian pada volume kali ini diisi oleh berbagai topik tulisan yaitu Pengembangan Energi Panas Bumi; Kinerja Program Kredit Usaha Rakyat; Dampak Pajak Tidak Langsung terhadap Distribusi Pendapatan; Kemampuan Pendanaan Pemerintah Daerah dalam Rangka Memberikan Jaminan Kesehatan, serta Pengaruh Defisit Anggaran terhadap Defisit Transaksi Berjalan.

Demikianlah kata pengantar yang dapat kami sampaikan. Ibarat peribahasa tiada gading yang tak retak, maka kami menyadari kajian ini tentunya masih terdapat kekurangan baik yang disengaja maupun yang tidak kami sengaja. Oleh karena itu, kami mengharapkan masukan dari para pembaca guna perbaikan di masa yang akan datang. Selanjutnya, kami berharap jurnal ini dapat memberikan manfaat kepada para pembaca sekalian. Selamat membaca!

Jakarta, Maret 2013
Dewan Redaksi

DAFTAR ISI

Cover	
Dewan Redaksi	ii
Kata Sambutan	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Gambar	vii
Kumpulan Abstrak (Bahasa Indonesia)	ix
Kumpulan Abstrak (Bahasa Inggris)	xiii

REVITALISASI INVESTASI PENGEMBANGAN ENERGI PANAS BUMI DI INDONESIA

Oleh: Ragimun	1-24
---------------------	------

ANALISIS KINERJA PROGRAM KREDIT USAHA RAKYAT DALAM PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGANNYA

Oleh: Mohamad Nasir	25-44
---------------------------	-------

THE IMPACT OF TAXES ON PRODUCTION ON INCOME DISTRIBUTION IN INDONESIA

Oleh: Kunta Nugraha	45-56
---------------------------	-------

ANALISIS KEMAMPUAN PENDANAAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MEMBERIKAN JAMINAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN

Oleh: Sri Lestari Rahayu	57-90
--------------------------------	-------

PENGARUH DEFISIT ANGGARAN TERHADAP DEFISIT TRANSAKSI BERJALAN DI INDONESIA

Oleh: Muhammad Afdi Nizar	91-106
---------------------------------	--------

Indeks Subjek

Panduan Penulisan Kajian Ekonomi dan Keuangan

DAFTAR TABEL

REVITALISASI INVESTASI PENGEMBANGAN ENERGI PANAS BUMI DI INDONESIA

Tabel 2.1.	Cadangan Energi Fosil	4
Tabel 2.2.	Proyeksi Tambahan Pembangkit Listrik per Jenis Pembangkit dan Bahan Bakar (MW)	9
Tabel 4.1.	Potensi dan Kapasitas Energi Fosil	10
Tabel 4.2.	Potensi Energi Terbarukan di Indonesia	11
Tabel 4.3.	Biaya Investasi Energi Geothermal per kW	14
Tabel 4.4.	Biaya Operasional dan Pemeliharaan per Tahun (perkW)	15

ANALISIS KINERJA PROGRAM KREDIT USAHA RAKYAT DALAM PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGANNYA

Tabel 2.1.	Ketentuan-ketentuan Pokok KUR	29
Tabel 3.1.	Kepentingan Para <i>Stakeholders</i> Atas KUR	31
Tabel 4.1.	Faktor-Faktor Risiko Kredit Sektor Perdagangan dan Pertanian	33
Tabel 4.2.	Sebaran Debitur KUR dan Tenaga Kerja 2007 s.d. 2012	34
Tabel 4.3.	Perkembangan Belanja IJP dan PMN Pemerintah (Rp. Miliar)	35
Tabel 4.4.	Nilai Manfaat Adanya Penjaminan (Rp. Juta Kecuali NPL)	37
Tabel 4.5.	Perbandingan Penjaminan KUR dan Non KUR oleh PPK (Rp. Miliar)	38

THE IMPACT OF TAXES ON PRODUCTION ON INCOME DISTRIBUTION IN INDONESIA

Table 2.1.	<i>Taxes on Production: Tax Rate, Tax Base and Exemptions</i>	47
Table 4.1.	<i>Adjusted Per Capita Income by Deciles, per Cent</i>	53
Table 4.2.	<i>The Effective Tax Rate and the Burden of Taxes on Production in 2008</i>	54
Table 4.3.	<i>Income Inequality of Two Different Type of Income, 2008</i>	55

ANALISIS KEMAMPUAN PENDANAAN PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MEMBERIKAN JAMINAN KESEHATAN BAGI MASYARAKAT MISKIN

Tabel 4.1.	Jaminan Kesehatan, Jumlah Peserta, Alokasi dan Realisasinya s.d. Mei 2011	67
Tabel 4.2.	Jumlah Penduduk Dalam Kepesertaan Jaminan Kesehatan Tahun 2010	68
Tabel 4.3.	Perkembangan Anggaran Jamkesmas Tahun 2005-2011 (miliar rupiah)	70
Tabel 4.4.	Pembagian Urusan Wajib dan Pilihan dalam Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	74
Tabel 4.5.	Perkembangan PDRB per Kapita atas Dasar Harga Berlaku Berdasarkan Provinsi Tahun 2005-2009	77

PENGARUH DEFISIT ANGGARAN TERHADAP DEFISIT TRANSAKSI BERJALAN DI INDONESIA

Tabel 4.1.	Uji Stasioneritas <i>Phillips-Peron (PP) Test</i>	96
Tabel 4.2.	Penentuan Panjang <i>Lag</i> Optimal	97
Tabel 4.3.	Hasil Estimasi Model VAR	98
Tabel 4.4.	Hasil Uji Stabilitas	98
Tabel 4.5.	Dekomposisi Varian Defisit Fiskal dan Defisit Transaksi Berjalan	102

DAFTAR GAMBAR

REVITALISASI INVESTASI PENGEMBANGAN ENERGI PANAS BUMI DI INDONESIA

Gambar 2.1. Mengapa Pengembangan Energi Terbarukan Tidak Cepat	7
--	---

ANALISIS KINERJA PROGRAM KREDIT USAHA RAKYAT DALAM PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGANNYA

Gambar 2.1 Prosedur Kredit	28
Gambar 2.2 Kerangka Hubungan Penyaluran KUR	30
Gambar 3.1 Kerangka Identifikasi Kepentingan	30
Gambar 4.1 Realisasi Penyaluran KUR 2007 s.d 2012	32
Gambar 4.2 Realisasi Penyaluran KUR per Sektor 2007 s.d 2012	32
Gambar 4.3 Sebaran Penyaluran KUR per Wilayah Periode 2007 s.d. 2012	34
Gambar 4.4 Sebaran Penyaluran KUR per Bank Pelaksana 2007-2012	36
Gambar 4.5 SBDK Bank Pelaksana dan Suku Bunga (SB) KUR Retail (%)	37
Gambar 4.6 Perkembangan dan Persentase Penjaminan KUR 2007-2012	38
Gambar 4.7 Ringkasan Laba Rugi Konsolidasi Askrindo (Rp. Miliar)	39
Gambar 4.8 Ringkasan Laba Rugi Pelaksanaan Penjaminan KUR Askrindo (Rp. Miliar)	39
Gambar 4.9 Kontribusi Penjaminan KUR terhadap Pendapatan, Beban, dan Laba-Rugi Bersih Konsolidasi	40
Gambar 4.10 Ringkasan Laba Rugi Konsolidasi Jamkrindo (Rp Miliar)	40
Gambar 4.11 Ringkasan Laba Rugi Pelaksanaan Penjaminan KUR Askrindo (Rp Miliar)t	41
Gambar 4.12 Kontribusi Penjaminan KUR terhadap Pendapatan, Beban, dan Laba-Rugi Bersih Konsolidasi	41

THE IMPACT OF TAXES ON PRODUCTION ON INCOME DISTRIBUTION IN INDONESIA

Figure 4.1 Per Capita Tax Burden by Income Groups	52
---	----

PENGARUH DEFISIT ANGGARAN TERHADAP DEFISIT TRANSAKSI BERJALAN DI INDONESIA

Gambar 1.1 Neraca Perdagangan Barang, Neraca Jasa, dan Neraca Transaksi Berjalan, 1980 - 2012	92
Gambar 4.1 Hasil Uji Stabilitas	99
Gambar 4.2 Fungsi <i>Impulse Response</i> (IRF) Defisit Transaksi Berjalan dan Defisit Fiskal	99

MAJALAH KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN ISSN 1410-3249 KEK Terakreditasi (No. Akreditasi : 467/AU3/P2MI-LIPI/08/2012) Volume 17 Nomor 1, Maret 2013
<i>Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh difotokopi tanpa izin dan biaya</i>
ABSTRAK
Ragimun. (Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan) Revitalisasi Investasi Pengembangan Energi Panas Bumi di Indonesia Kajian Ekonomi dan Keuangan Volume 17 Nomor 1, Maret 2013, Halaman 1 – 24 <i>Abstrak</i> <i>Indonesia sebagai negara yang sedang membangun, memerlukan energi listrik yang sangat banyak. Oleh karena itu diperlukan pemanfaatan dari berbagai sumber untuk mencukupinya. Selama ini energi dari sumber fosil mendominasi pemenuhan energi nasional. Namun sumber energi fosil ini lambat laun akan habis, sehingga diperlukan energi terbarukan, yaitu antara lain dari energi geothermal. Energi ini disamping ramah lingkungan juga mempunyai cadangan yang sangat banyak. Tercatat 26 persen energi geothermal dunia ini berada di Indonesia. Akan tetapi sampai saat ini pengembangan energi geothermal baru berkisar 4 persen. Kendala utamanya adalah masalah investasi yang masih terbatas, serta reformasi kebijakan dan institusi untuk meningkatkan investasi. Oleh karena itu perlu dilakukan revitalisasi investasi energi geothermal melalui beberapa insentif fiskal maupun non fiskal yang berupa daya tarik investasi seperti harga jual energi listrik panas bumi yang menarik. Saat ini harga jual energi listrik panas bumi sebesar US\$0,97. Hal ini perlu dievaluasi kembali, agar menarik investor pada pengembangan geothermal di Indonesia.</i> <i>Kata Kunci : energi geothermal, kebutuhan energi nasional, kecukupan energi listrik nasional, revitalisasi investasi</i>
Nasir, Mohamad. (Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan) Analisis Kinerja Program Kredit Usaha Rakyat dalam Perspektif Pemangku Kepentingannya Kajian Ekonomi dan Keuangan Volume 17 Nomor 1, Maret 2013, Halaman 25 – 44 <i>Abstrak</i> <i>UMKM memiliki peran yang penting bagi perekonomian Indonesia, seperti menyerap tenaga kerja yang banyak dan berkontribusi yang signifikan terhadap PDB. Untuk mendukung UMKM lebih produktif dan berkembang, Pemerintah melaksanakan program KUR pada tahun 2007, sebuah program kredit bagi UMKM yang feasible dan not bankable, serta memiliki fasilitas penjaminan kredit. Pemerintah bekerjasama dengan beberapa bank dalam penyaluran dan PT Askindo (Persero) dan Perum Jamkrindo dalam penjaminan kreditnya. KUR telah berjalan lebih dari 5 tahun. Pertanyaannya, bagaimana kinerja KUR dalam perspektif para stakeholder-</i>

MAJALAH KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN**ISSN 1410-3249****KEK Terakreditasi****(No. Akreditasi : 467/AU3/P2MI-LIPI/08/2012)****Volume 17 Nomor 1, Maret 2013*****Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh difotokopi tanpa izin dan biaya*****ABSTRAK**

nya selama ini ? Dengan menggunakan analisis deskriptif diperoleh hasil bahwa bagi Pemerintah, KUR selama periode 2007-2012 telah tersalurkan sebesar Rp.97,6 triliun, diakses oleh 7,6 juta debitur. Bagi bank, KUR memberikan keuntungan karena suku bunga 13% untuk retail dan 22% untuk mikro masih di atas SBDK. Di samping itu, adanya penjaminan kredit dapat mengurangi kerugian bank dan memberikan kesempatan untuk melakukan penetrasi pasar atau debitur baru. Bagi perusahaan penjamin, KUR dapat meningkatkan pendapatan penjaminan. KUR juga memberikan laba bersih bagi Perum Jamkrindo sekitar Rp.738,6 miliar, namun KUR memberikan kerugian sebesar Rp.112,5 miliar bagi PT Askrindo.

Kata Kunci : bankable, feasible, kredit, laba, penjaminan, suku bunga

Nugraha, Kunta. (Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan)

The Impact of Taxes on Production on Income Distribution in Indonesia

Kajian Ekonomi dan Keuangan Volume 17 Nomor 1, Maret 2013, Halaman 45 - 56

Abstrak

Perekonomian Indonesia tumbuh secara cepat sejak tahun 2000, namun ketimpangan pendapatan memburuk sejak tahun 2001. Salah satu kebijakan pemerintah untuk memperbaiki ketimpangan pendapatan adalah melalui pemungutan pajak. Tulisan ini mengevaluasi pajak atas produksi dan dampaknya terhadap distribusi pendapatan menggunakan model Scutella. Dampak terhadap distribusi pendapatan dihitung dengan menentukan beban pajak untuk setiap kelompok pendapatan rumah tangga. Data utama yang digunakan adalah survei sosial ekonomi nasional (Susenas) dan tabel Input-Output. Hasil penting yang diperoleh adalah pajak atas produksi memperburuk ketimpangan pendapatan dan pajak tersebut regresif, terutama untuk rumah tangga menengah ke bawah. Hasil lainnya konsumen rokok mempunyai beban pajak atas produksi yang paling berat. Dengan demikian, saran dari tulisan ini adalah pajak atas produksi di Indonesia memperburuk ketimpangan pendapatan dan semakin tinggi tarif pajak efektif (effective tax rate) tidak berarti bahwa beban pajak atas produksi terhadap konsumen juga semakin tinggi.

Kata Kunci: beban pajak, distribusi pendapatan, pajak atas produksi, tarif pajak efektif

MAJALAH KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN ISSN 1410-3249 KEK Terakreditasi (No. Akreditasi : 467/AU3/P2MI-LIPI/08/2012) Volume 17 Nomor 1, Maret 2013
<i>Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh difotokopi tanpa izin dan biaya</i>
ABSTRAK
Rahayu, Sri Lestari. (Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan) Analisis Kemampuan Pendanaan Pemerintah Daerah dalam Rangka Memberikan Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin Kajian Ekonomi dan Keuangan Volume 17 Nomor 1, Maret 2013, Halaman 57 – 90 <i>Abstrak</i> <i>Dalam tahun 2010 penduduk Indonesia yang memiliki jaminan kesehatan baru mencapai 139.424.348 jiwa (59,07 persen dari jumlah penduduk), sedang sisanya 40,93 persen belum memiliki jaminan kesehatan. Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan Sulawesi Selatan 100 persen penduduknya sudah memiliki jaminan kesehatan, diikuti oleh Provinsi Sumatera Selatan dan Bali masing-masing sebesar 99,60 persen dan 99,56 persen. Ke depan, apakah pendanaan jaminan kesehatan sebaiknya masih akan diberikan sesuai dengan kapitasi jumlah penduduk, atau dialihkan kepada peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di puskesmas, rumah sakit, pemberian insentif bagi tenaga medis, penyediaan obat-obatan, maupun sarana dan prasarannya sesuai dengan kemampuan Pemerintah Daerah, sehingga seluruh masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang ditentukan.</i> <i>Kata Kunci : insentif, jamkesmas, pemma</i>
Nizar, Muhammad Afdi. (Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan) Pengaruh Defisit Anggaran terhadap Defisit Transaksi Berjalan di Indonesia Kajian Ekonomi dan Keuangan Volume 17 Nomor 1, Maret 2013, Halaman 91 – 106 <i>Abstrak</i> <i>Studi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh defisit anggaran terhadap defisit transaksi berjalan di Indonesia dalam periode tahun 1990 – 2012. Dengan menggunakan data time series kuartalan dan model VAR, hasil studi ini menunjukkan bahwa : (i) defisit anggaran berpengaruh positif terhadap defisit transaksi berjalan. Dalam periode 1990 – 2012 pengaruh defisit anggaran relatif kecil dan berlangsung cepat (satu kuartal), sedangkan dalam periode 1990 – 1997 pengaruhnya lebih besar dan dengan durasi yang lebih panjang (dua kuartal atau satu semester), dan (ii) hasil studi ini mengkonfirmasi dan sejalan dengan hipotesis defisit kembar (twin deficit hypothesis). Oleh karena itu, pemerintah perlu menempuh langkah-langkah</i>

MAJALAH KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN ISSN 1410-3249 KEK Terakreditasi (No. Akreditasi : 467/AU3/P2MI-LIPI/08/2012) Volume 17 Nomor 1, Maret 2013
<i>Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh difotokopi tanpa izin dan biaya</i>
ABSTRAK
<i>konkret dengan menekan impor minyak (BBM). Karena impor BBM selain berpotensi menambah defisit transaksi berjalan juga berimplikasi menambah besaran subsidi BBM (dan defisit) dalam APBN.</i> <i>Kata Kunci : defisit anggaran, defisit transaksi berjalan, hipotesis defisit kembar, neraca pembayaran</i>

MAJALAH KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN**ISSN 1410-3249****KEK Terakreditasi****(No. Akreditasi : 467/AU3/P2MI-LIPI/08/2012)****Volume 17 Nomor 1, Maret 2013**

The keywords noted here are the words which represent the concept applied in a writing. The abstracts are allowed to copy without permission from the publisher and free of charge

ABSTRACT

Ragimun. (Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan)

Revitalisasi Investasi Pengembangan Energi Panas Bumi di Indonesia

Kajian Ekonomi dan Keuangan Volume 17 Nomor 1, Maret 2013, Halaman 1 - 24

Abstract

Premises as a country that is being build, requiring electrical energy very much. It is therefore necessary for the utilization of various sources of insufficiency. During this energy from fossil sources dominate the national energy needs. But this fossil energy sources will eventually run out. So that the necessary renewable energy, among other things of geothermal energy. This energy is in addition to friendly neighborhood also has a reserve that very much. Recorded 26 percent of world geothermal energy in Indonesia. However, until recently the development of new geothermal energy range from 4 percent. The main obstacle is the issue of investment is still limited, as well as policy and institutional reforms to increase investment. It is therefore necessary to revitalize geothermal energy investments through several fiscal and non fiscal incentives in the form of investment attraction such as the selling price of electricity energy geothermal interest. Current selling price of geothermal electrical energy for U.S. \$ 0.97. This needs to be re-evaluated, in order to attract investors in geothermal development in Indonesia.

Keywords: geothermal energy, national energy needs, revitalization of investment, the adequacy of the national electric energy

Nasir, Mohamad. (Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan)

Analisis Kinerja Program Kredit Usaha Rakyat dalam Perspektif Pemangku Kepentingannya

Kajian Ekonomi dan Keuangan Volume 17 Nomor 1, Maret 2013, Halaman 25 - 44

Abstract

SMEs have significant role for Indonesian economic, such as employing many labors and significant contribution to GDP. To support them more productive, Government launched a KUR in 2007, a credit program for SMEs that is feasible but not bankable, and has credit guarantee facility. Govenrment has cooperated with some Banks for credit and with PT Askrindo and Perum Jamkrindo for credit guarantee. Since 2007, KUR has been run over 5 years. The question is how the performance of KUR viewed by Government, Banks, and Credit Guarantee Enterprises perspectives. Bu using descriptive analysis methode, the research shows that for Government perspective, KUR has

MAJALAH KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN**ISSN 1410-3249****KEK Terakreditasi****(No. Akreditasi : 467/AU3/P2MI-LIPI/08/2012)****Volume 17 Nomor 1, Maret 2013**

The keywords noted here are the words which represent the concept applied in a writing. The abstracts are allowed to copy without permission from the publisher and free of charge

ABSTRACT

distributed credit around Rp.97.6 triliun for around 7.6 million debtors during 2007-2013. For perspective of Banks, KUR has given profit because its interest rate (13% for retail and 22% for mikro) above basic lending rate of banks. Credit guarantee facility also has supported banks to penetrate new market or new debtors. For credit guarantee enterprises, KUR has been able to increase their income. KUR has given net profit for Perum Jamkrindo Rp.738.6 billion, but has given net loss for PT Askrindo around Rp.112.5 billion.

Keyword : bankable, credit, feasible, guarantee, interest, profit

Nugraha, Kunta. (Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan)

The Impact of Taxes on Production on Income Distribution in Indonesia

Kajian Ekonomi dan Keuangan Volume 17 Nomor 1, Maret 2013, Halaman 45 - 56

Abstract

The Indonesian economy has grown significantly since 2000, but income inequality has increased since 2001. One of the possible government tools to improve income inequality is through taxation. This paper evaluates taxes on production and their impact on income distribution using Scutella methods. The impact of taxes on production on household income distribution provides the measure for determining the tax burden for each household income groups. This method uses the National Socioeconomic Survey and the Input-Output Table for major data sources. The key finding is that taxes on production worsen income distribution and the form of this tax is regressive, especially for lower and middle income households. The other key finding is that the consumers of cigarettes have the highest burden of taxes on production. The results suggest that Indonesian taxes on production worsen income inequality and the higher effective tax rates do not mean the higher the burden of taxes on production for consumers.

Keywords: burden of tax, effective tax rates, income distribution, taxes on production

MAJALAH KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN ISSN 1410-3249 KEK Terakreditasi (No. Akreditasi : 467/AU3/P2MI-LIPI/08/2012) Volume 17 Nomor 1, Maret 2013
<i>The keywords noted here are the words which represent the concept applied in a writing. The abstracts are allowed to copy without permission from the publisher and free of charge</i>
ABSTRACT
Rahayu, Sri Lestari. (Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan) Analisis Kemampuan Pendanaan Pemerintah Daerah dalam Rangka Memberikan Jaminan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin Kajian Ekonomi dan Keuangan Volume 17 Nomor 1, Maret 2013, Halaman 57 – 90 Abstract <i>In the year 2010 the number of citizens who have health coverage reaching 139 424 348 or 59.07 percent of Indonesia's population, while the remaining 40.93 percent do not have health insurance. Province of Nangroe Aceh Darussalam and South Sulawesi entire population already have health insurance, while that of South Sumatera and Bali respectively reached 99.60 percent and 99.56 percent.</i> <i>Health insurance needs to be evaluated, whether based on capitation funding awarded in accordance with the number of people, or diverted to improving the quality of health services in health centers, hospitals, incentives for medical personnel, provision of medicines, as well as the procurement of medical equipments in accordance with the local government, so that the whole communities to utilize health care facilities specified.</i> <i>Keywords : funding, health insurance for the poor, regional government</i>
Nizar, Muhammad Afdi. (Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan) Pengaruh Defisit Anggaran terhadap Defisit Transaksi Berjalan di Indonesia Kajian Ekonomi dan Keuangan Volume 17 Nomor 1, Maret 2013, Halaman 91 – 106 Abstract <i>This study aims to determine the effect of budget deficits on the current accounts deficit in Indonesia during 1990 – 2012. Based on quarterly time series data and using VAR model, the results of this study indicate that : (i) a positive effect of the budget deficit on the current account deficit. In the period 1990 - 2012 the effect of budget deficits is relatively small and rapid (one quarter), while in the period 1990-1997 budget deficits had greater influence with a longer duration (a semester) on current accounts deficit, and (ii) the results of this study confirm and in line with the twin deficit hypothesis. Therefore, the government should take concrete steps to reduce imports of oil (fuel). Because of fuel imports potentially add to the current</i>

MAJALAH KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN ISSN 1410-3249 KEK Terakreditasi (No. Akreditasi : 467/AU3/P2MI-LIPI/08/2012) Volume 17 Nomor 1, Maret 2013
<i>The keywords noted here are the words which represent the concept applied in a writing. The abstracts are allowed to copy without permission from the publisher and free of charge</i>
ABSTRACT
<i>accounts deficit and also the amount of fuel subsidies (and deficit) in the state budget.</i> <i>Keywords: balance of payments, budget deficit, current accounts deficit, twin deficit hypothesis</i>

ANALISIS KINERJA PROGRAM KREDIT USAHA RAKYAT DALAM PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGANNYA¹

Analysis of the Performance of SMEs Credit Program in the Stakeholders' Perspectives

Mohamad Nasir

Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan
Jln. Dr. Wahidin No. 1, Jakarta Pusat 10710, DKI Jakarta, Indonesia
Email: annasiru@fiskal.depkeu.go.id

Naskah diterima: 3 Februari 2013

Naskah direvisi: 26 Februari 2013

Disetujui diterbitkan: 6 Maret 2013

ABSTRACT

SMEs have significant role for Indonesian economic, such as employing many labors and significant contribution to GDP. To support them more productive, Government launched a KUR in 2007, a credit program for SMEs that is feasible but not bankable, and has credit guarantee facility. Government has cooperated with some Banks for credit and with PT Askrindo and Perum Jamkrindo for credit guarantee. Since 2007, KUR has been run over 5 years. The question is how the performance of KUR viewed by Government, Banks, and Credit Guarantee Enterprises perspectives. By using descriptive analysis method, the research shows that for Government perspective, KUR has distributed credit around Rp.97.6 triliun for around 7.6 million debtors during 2007-2013. For perspective of Banks, KUR has given profit because its interest rate (13% for retail and 22% for mikro) above basic lending rate of banks. Credit guarantee facility also has supported banks to penetrate new market or new debtors. For credit guarantee enterprises, KUR has been able to increase their income.

Keywords : bankable, credit, feasible, guarantee, interest, profit

ABSTRAK

UMKMK memiliki peran yang penting bagi perekonomian Indonesia, seperti menyerap tenaga kerja yang banyak dan berkontribusi yang signifikan terhadap PDB. Untuk mendukung UMKMK lebih produktif dan berkembang, Pemerintah melaksanakan program KUR pada tahun 2007, sebuah program kredit bagi UMKMK yang *feasible* dan *not bankable*, serta memiliki fasilitas penjaminan kredit. Pemerintah bekerjasama dengan beberapa bank dalam penyaluran dan PT Askrindo (Persero) dan Perum Jamkrindo dalam penjaminan kreditnya. KUR telah berjalan lebih dari 5 tahun. Pertanyaannya, bagaimana kinerja KUR dalam perspektif para stakeholder-nya selama ini ? Dengan menggunakan analisis deskriptif diperoleh hasil bahwa bagi Pemerintah, KUR selama periode 2007-2012 telah tersalurkan sebesar Rp.97,6 triliun, diakses oleh 7,6 juta debitur. Bagi bank, KUR memberikan keuntungan karena suku bunga 13% untuk retail dan 22% untuk mikro masih di atas SBDK. Di samping itu, adanya penjaminan kredit dapat mengurangi kerugian bank dan memberikan kesempatan untuk melakukan penetrasi pasar atau debitur baru. Bagi perusahaan penjamin, KUR dapat meningkatkan pendapatan penjaminan.

Kata Kunci : *bankable, feasible*, kredit, laba, penjaminan, suku bunga

¹ Tulisan ini merupakan pendapat pribadi dan tidak mencerminkan pendapat instansi tempat penulis bekerja.

I. PENDAHULUAN

Peran usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKM) bagi perekonomian Indonesia sangat penting. Hal ini terlihat dari jumlah unit usaha UMKM yang ada, kemampuan menyerap tenaga kerja, dan kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Dari sisi jumlah, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop dan UKM) (2013) memperkirakan bahwa jumlah usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) pada tahun 2012 mencapai 56,5 juta unit usaha atau 99,99% dari total unit usaha di Indonesia. Kemenkop dan UKM (2013) juga memperkirakan UMKM mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 107,7 juta orang atau 97,1% dari total tenaga kerja nasional pada tahun yang sama. Dari sisi kontribusinya terhadap PDB harga berlaku nasional, UMKM berkontribusi sebesar 59,1% dengan nilai Rp4.869.568.1 miliar (Kemenkop dan UKM, 2013).

Peran besar UMKM tentunya perlu didorong untuk lebih berkembang dan memberikan nilai tambah yang semakin besar. Namun sayang, bukan menjadi rahasia lagi bahwa UMKM mengalami kesulitan untuk mendapatkan pendanaan atau *financing access* dari perbankan. Perbankan tidak termotivasi untuk menyalurkan kredit pada UMKM, dan lebih menyukai menyalurkan kredit pada usaha besar (debitur besar) karena UMKM memiliki potensi risiko gagal bayar tinggi, jauh lebih besar dibandingkan dengan usaha besar. Selain itu, debitur besar lebih mudah dimonitor dan biaya administrasinya lebih murah dibandingkan dengan debitur kecil.

Secara umum tingginya risiko gagal bayar kredit UMKM disebabkan oleh beberapa faktor kelemahan UMKM itu sendiri. Afiah (2009) dalam Lentera (2012) menyampaikan beberapa faktor kelemahan UMKM, antara lain : 1) kelembagaan yang lemah, mudah membubarkan diri dan sekaligus mudah dibentuk. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian usaha meningkat. 2) UMKM tidak memiliki manajemen yang baik, dikelola secara tradisional, mengingat UMKM pada umumnya dikelola oleh orang-orang kurang berpendidikan dan profesional. 3) UMKM tidak memiliki dukungan teknologi yang baik untuk mendukung usahanya. Terakhir, Kemampuan UMKM dalam mengakses informasi dan pasar yang lemah.

Pada tahun 2007, Pemerintah melalui Instruksi Presiden No. 6 tahun 2007 mencoba mengatasi permasalahan kesulitan UMKM dalam mengakses perbankan. Pemerintah melaksanakan program Kredit Usaha Rakyat (KUR), yaitu suatu program kredit yang diperuntukan untuk UMKM yang *feasible* tapi tidak *bankable* secara agunan. Di samping itu, program KUR menggunakan sumber pendanaan dari Bank, dan menggunakan fasilitas penjaminan kredit. Penjaminan kredit menggunakan sistem *automatic conditional cover* dengan cakupan penjaminan sebesar 80% untuk sektor pertanian, perikanan, perkebunan dan TKI atau 70% untuk sektor lainnya. Agar tidak membebani beban calon debitur, premi penjaminannya dibayar oleh Pemerintah. Untuk penyaluran kredit, Pemerintah bekerjasama dengan beberapa bank, seperti BRI, Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, BNI, BNI Syariah, BTN, BUKOPIN dan beberapa BPD. Sedangkan untuk penjaminannya, Pemerintah bekerjasama dengan PT Askrindo, Perum Jamkrindo, dan beberapa Jamkrida.

Kini, realisasi penyaluran KUR per 31 Desember 2013 telah mencapai Rp.97,6 triliun dalam waktu kurang dari 6 tahun, dan diakses oleh sekitar 7,6 juta debitur (Kemenko Perekonomian, 2013). Sebuah pencapaian yang luar biasa. Namun demikian, timbul pertanyaan tentang seberapa jauh kinerja penyaluran KUR ini telah mengakomodasi kepentingan para pemangku kepentingan (*stakeholders*), seperti Pemerintah, Bank Pelaksana, dan Perusahaan Penjamin Kredit (PPK). Karena itu, untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan analisis kinerja pelaksanaan program KUR dalam perspektif kepentingan 3 *stakeholders* tersebut, yaitu : Pemerintah sebagai pemilik program, Bank Pelaksana sebagai pemilik dana atau modal, dan PPK dalam hal ini PT Askrindo (Persero) dan Perum Jamkrindo sebagai penjamin kredit atas risiko gagal bayar debitur.

Kepentingan debitur tidak dibahas dalam penulisan ini karena secara otomatis telah masuk dalam pembahasan pada ketiga perspektif kepentingan di atas.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian dan Penyaluran Kredit

Masyarakat umum telah mengenal dengan baik istilah kredit dalam kehidupan sehari-hari, meskipun mereka mengenalnya dalam istilah yang berbeda-beda seperti dalam istilah rentenir atau utang. Dalam bahasa Yunani, istilah kredit berasal dari kata "credere" atau "credo" yang memiliki makna kepercayaan (*trust* atau *faith*), dan makna ini yang menjadi landasan dasar dalam pemberian kredit di mana pemilik uang mempercayakan uangnya kepada pihak lain (Musrikin W., 2012).

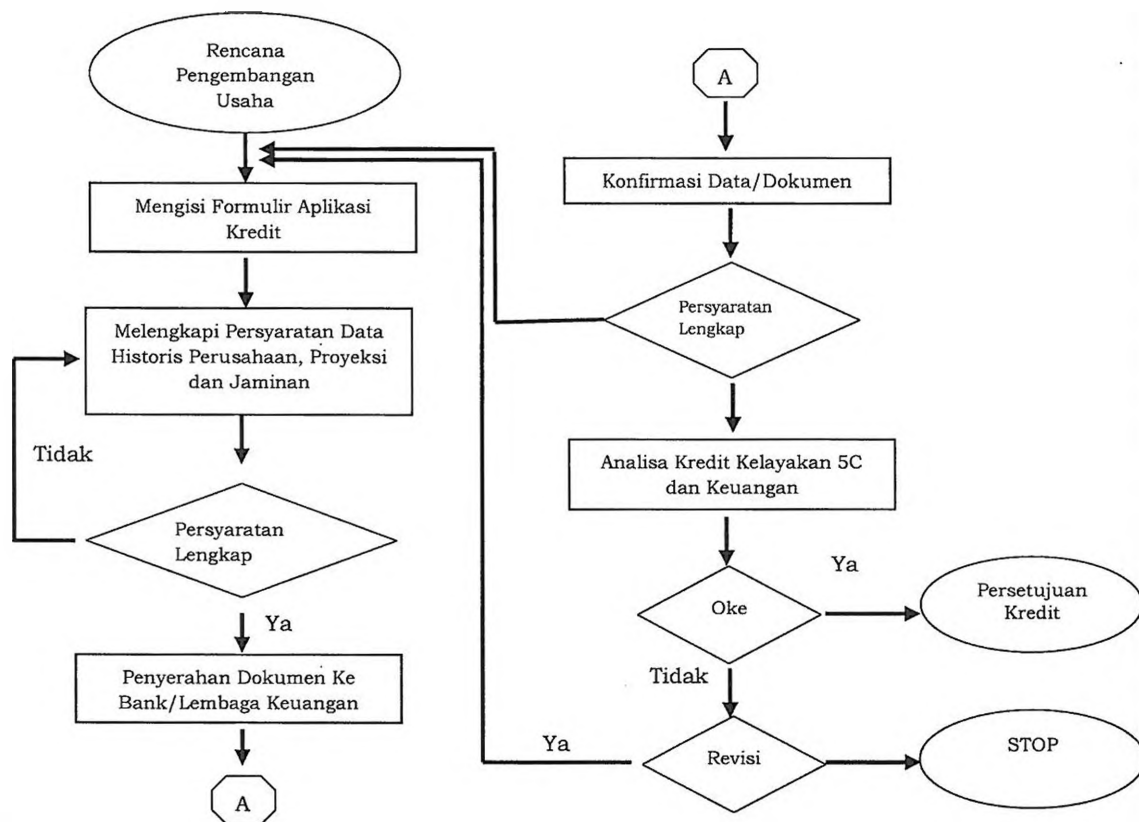
Pengertian kredit secara formal termuat dalam UU No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 butir 11, di mana kredit diartikan sebagai berikut :

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dalam penyaluran kredit, secara umum Bank akan mempertimbangkan 2 hal yaitu tingkat suku bunga (tingkat pengembalian investasi untuk bank) dan risiko gagal bayar debitur atas pokok kredit berikut bunganya. Selanjutnya, dalam mengevaluasi kedua hal tersebut, Bank selalu memegang prinsip 5 C, yaitu : *character, capacity, capital, conditions*, dan *collateral*. Pengertian dari masing-masing prinsip tersebut, adalah sebagai berikut (Sanusi A., 2011) :

- a. *Character*. Prinsip ini terfokus pada karakter calon debitur dan bertujuan untuk mengetahui kemauan (*willingness to pay*) calon debitur terhadap kewajibannya. Hal-hal yang dianalisis seperti sifat, kebiasaan sehari-hari, latar belakang keluarga dan lain sebagainya.
- b. *Capacity*. *Capacity* digunakan untuk menilai kemampuan calon debitur apakah usaha yang dijalankan cukup untuk membayar pokok pinjaman berikut bunganya ketika telah jatuh tempo. Hal-hal yang dapat dilihat dari *track record* usaha di masa lalu, apakah pernah mengalami kegagalan usaha.
- c. *Capital* atau modal, pada umumnya digunakan untuk menentukan berapa besar plafon kredit yang layak diberikan. Penentuan ini dapat dilihat dari indikator modal dan aset yang dikelola calon debitur, laporan keuangan seperti tingkat penjualan, beban, laba bersih, dan lain sebagainya.
- d. *Condition of economy*. Kondisi ekonomi sebagai lingkungan tempat di mana calon debitur berada juga dapat berpengaruh terhadap kinerja usaha calon debitur. Prinsip ini perlu juga untuk diketahui, dianalisis, dan diukur untuk mengetahui pengaruhnya terhadap usaha calon debitur dan selanjutnya akan menjadi risiko gagal bayar debitur.
- e. *Collateral* atau agunan. Secara umum, bank meminta jaminan kepada calon debitur ketika menyalurkan kredit. Jaminan ini dapat berupa tanah, tanah dan bangunan, dan barang lainnya yang memiliki nilai ekonomis. Hal ini digunakan untukantisipasi terjadinya risiko gagal bayar debitur. Bank akan melikuidasi atau menjual barang jaminan tersebut sebagai pengganti kewajiban debitur bila debitur tidak mampu membayar kewajibannya tersebut.

Selain itu, dalam proses penyaluran kredit biasanya diatur melalui suatu skema proses yang biasa disebut dengan prosedur kredit sebagaimana terlihat dalam Gambar 2.1. Prosedur kredit ini terbagi menjadi 2 tahapan proses, yaitu proses pengajuan kredit dan perlengkapan administrasi oleh debitur dan proses verifikasi data dan analisis kelayakan kredit (kelayakan 5C dan keuangan) oleh pihak bank untuk menentukan apakah pengajuan kredit tersebut dapat disetujui atau tidak.



Sumber : Bank Indonesia. prosedur kredit. digambar kembali

Gambar 2.1. Prosedur Kredit.

2.2. Penjaminan Kredit

Pengertian penjaminan kredit secara sederhana dapat ditemukan dalam PMK No.99/PMK.010/2011, yaitu kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial terjamin. Sedangkan pengertian lebih luasnya adalah program yang menjamin pembayaran kembali atas pinjaman baik dalam jumlah penuh atau sebagian, bertujuan untuk mendorong pemilik dana untuk memberikan pinjaman kepada pihak yang mengalami kesulitan mendapatkan pinjaman karena suatu kondisi tertentu (Navajas A.R., 2001). Dari pengertian dapat dipahami bahwa penjaminan kredit dalam perbankan merupakan hal yang umum dan menjadi salah satu perlakuan atas adanya risiko kredit yaitu risiko gagal bayar debitur yang mungkin terjadi.

Berdasarkan hubungan antar pihak berkepentingan, dana, dan lain sebagainya, penjaminan kredit dapat dibedakan menjadi beberapa klasifikasi atau jenis (Navajas, A.R, 2001), yaitu :

- Direct and indirect guarantees.* Klasifikasi ini didasarkan pada hubungan lembaga donor dalam proses penjaminan. Dalam penjaminan langsung (*direct guarantee*), lembaga donor terlibat langsung dalam proses administrasi penjaminan kredit, sedangkan dalam penjaminan tidak langsung (*indirect guarantee*), administrasi penjaminan dilakukan oleh pihak ketiga.
- Individual and portfolio models.* Klasifikasi penjaminan ini didasarkan pada cara penjaminan terhadap debitur apakah dilakukan secara individual debitur atau secara berkelompok atau portofolio debitur.
- Funded and unfunded schemes.* Klasifikasi ini didasarkan pada sumber dana yang digunakan dalam penjaminan. Dana Funded scheme berasal dari bank sentral, lembaga keuangan bank dan non bank, dan lain sebagainya. Sementara itu, unfunded scheme menggunakan dana dari Pemerintah.

- d. *Open and targeted schemes*. Jenis penjaminan ini didasarkan pada persyaratan bagi debitur yang akan dijamin. Dalam open scheme, semua debitur diperbolehkan untuk mendapatkan penjaminan atas kredit, sedangkan dalam targeted scheme hanya debitur tertentu yang diperbolehkan. Sebagai contoh, penjaminan KUR, di mana yang mendapatkan penjaminan adalah debitur UMKMK yang *feasible* tapi *not bankable*.
- e. *Ex-ante and ex-post schemes*. Klasifikasi penjaminan ini didasarkan pada kapan permintaan penjaminan diajukan. Dalam skema *Ex-ante*, debitur mengajukan penjaminan terlebih dahulu kepada pihak penjamin sebelum terlebih dahulu mengajukan pinjaman kepada bank. Sebaliknya, pada skema *Ex-post* permohonan penjaminan setelah pengajuan kredit.
- f. *Intermediary model*. Jenis penjaminan ini sangat cocok untuk keuangan mikro yang melibatkan lembaga keuangan mikro yang terutama bertindak sebagai lembaga *linkage channeling*. Bank menyalurkan kredit kepada lembaga keuangan mikro, dan lembaga mikro tersebut meneruskan kepada debitur. Selain menyalurkan, bank juga memberikan penjaminan atas penyaluran kredit yang dilakukan oleh lembaga mikro tersebut.

2.3. Kredit Usaha Rakyat

Program KUR dilaksanakan atas dasar hukum Inpres No. 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil Dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Pelaksanaan teknis lapangan penyaluran KUR diatur melalui Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan KUR (SOP KUR). Sampai dengan saat ini (awal 2013), SOP KUR telah mengalami beberapa kali perubahan, dan yang terakhir ditetapkan melalui Keputusan Deputy Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian No. KEP-14/D.I.M.EKON/02/2012.

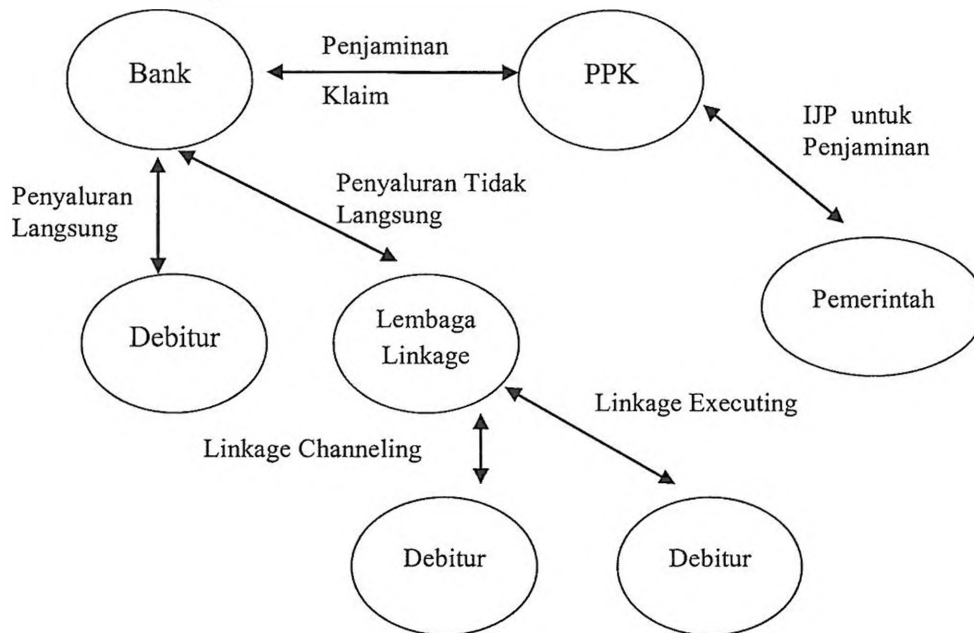
Berikut uraian ringkas tentang beberapa ketentuan utama petunjuk pelaksanaan penyaluran KUR sebagaimana telah ditentukan dalam SOP program KUR, antara lain :

Tabel 2.1. Ketentuan-ketentuan Pokok KUR

Pokok-pokok Ketentuan	Uraian
Debitur	Usaha Mikro, Kecil Menengah, Koperasi, kelompok dan usaha, dan lembaga linkage (executing) yang memiliki usaha layak tapi tidak bankable
Plafon dan Bunga Pinjaman	KUR mikro : Di atas Rp5 juta s.d. Rp20 juta, bunga maksimal 22% efektif. KUR Retail : Di atas Rp.20 juta s.d Rp.500 juta, maksimal 13% efektif.
Skema Penyaluran	Langsung dari Bank ke debitur, Tidak Langsung Melalui Lembaga Linkage (linkage channeling dan linkage executing).
Jangka waktu	Maksimal 3 tahun untuk modal kerja, 5 tahun investasi. Perpanjangan : maksimal 6 tahun untuk modal kerja dan maksimal 10 tahun untuk investasi. Perkebunan tanaman keras dapat diberikan langsung 13 tahun.
Sistem Penjaminan Kredit	<i>Automatic Conditional Cover</i> , Penjaminan akan dilakukan secara otomatis bila telah memenuhi persyaratan penyaluran. Bank pelaksana mengajukan penjaminan atas KUR, dan PPK akan menjamin kredit tersebut selama memenuhi persyaratan SOP pelaksanaan KUR.
IJP dan cakupan penjaminan	IJP dibayar oleh Pemerintah dengan tarif 3,25% dan cakupan penjaminan sebesar 80% untuk sektor pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, industri kecil dan tenaga kerja Indonesia (TKI), dan 70% untuk sektor lainnya

Sumber : Kemenko Perekonomian. 2012. SOP pelaksanaan KUR

Sementara itu, gambaran hubungan antara pihak dalam penyaluran KUR adalah sebagai berikut :

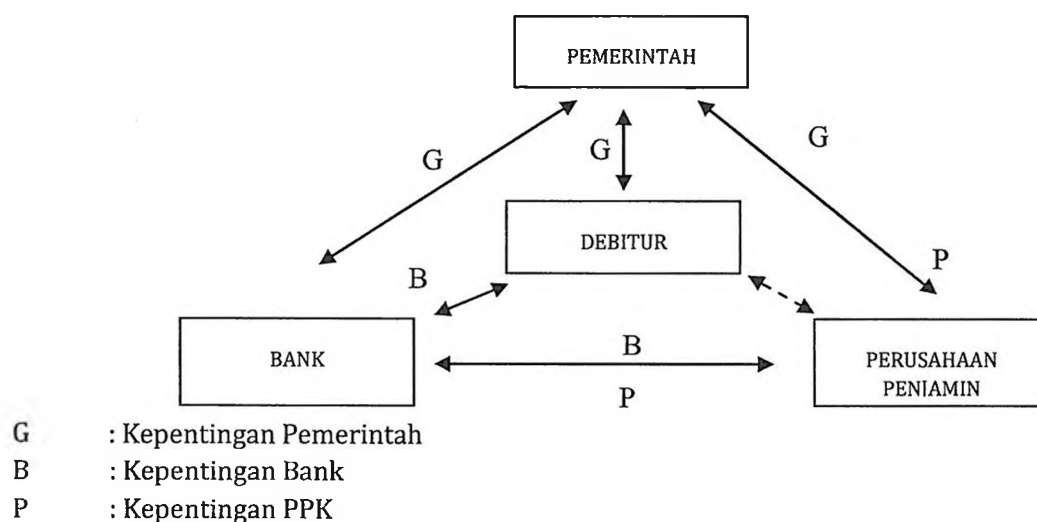


Sumber : Hasil identifikasi penulis

Gambar 2.2. Kerangka Hubungan Penyaluran KUR.

III. METODOLOGI

Untuk menjawab tujuan penelitian, maka perlu terlebih dahulu diidentifikasi dan diketahui kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan Pemerintah, Bank Pelaksana, dan PPK terhadap pelaksanaan program KUR tersebut. Setelah teridentifikasi, selanjutnya akan dilakukan analisis tingkat kepentingan dan dampaknya bagi ketiga pihak tersebut dengan menggunakan metode analisis deskriptif yaitu suatu metode yang menganalisis atas kondisi-kondisi atau gambaran-gambaran yang sesungguhnya terjadi di lapangan.



Sumber : Hasil identifikasi penulis

Gambar 3.1. Kerangka Identifikasi Kepentingan.

Dari Gambar 3.1 dapat diuraikan beberapa kepentingan ketiga pihak tersebut terhadap pelaksanaan KUR, yaitu :

Tabel 3.1. Kepentingan Para *Stakeholders* atas KUR

Pemangku Kepentingan	Kepentingan
Pemerintah	- o Besarnya penyaluran KUR - o Jumlah debitur, peningkatan kapasitas debitur, dan penyerapan tenaga kerja oleh debitur. - o Imbalan jasa penjaminan (IJP) yang dibayar pemerintah kepada perusahaan penjamin. IJP merupakan biaya subsidi yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah untuk memberikan fasilitas penjaminan.
Bank Pelaksana	- o Pendapatan yang diperoleh dalam penyaluran KUR - o Tingkat NPL dan besarnya potensi manfaat dari penjaminan KUR.
Perusahaan Penjamin	- o Kontribusi pendapatan dari penjaminan KUR terhadap kegiatan penjaminan kredit secara keseluruhan. - o Laba bersih yang diperoleh dari penjaminan KUR. Laba bersih dapat merepresentasikan keterkaitan antara <i>non performing guarantee</i> (NPG) dengan IJP, di mana bila $NPG > IJP$ dapat menimbulkan kerugian, dan sebaliknya bila $NPG < IJP$, PPK akan memperoleh laba.

Sumber : Hasil identifikasi penulis

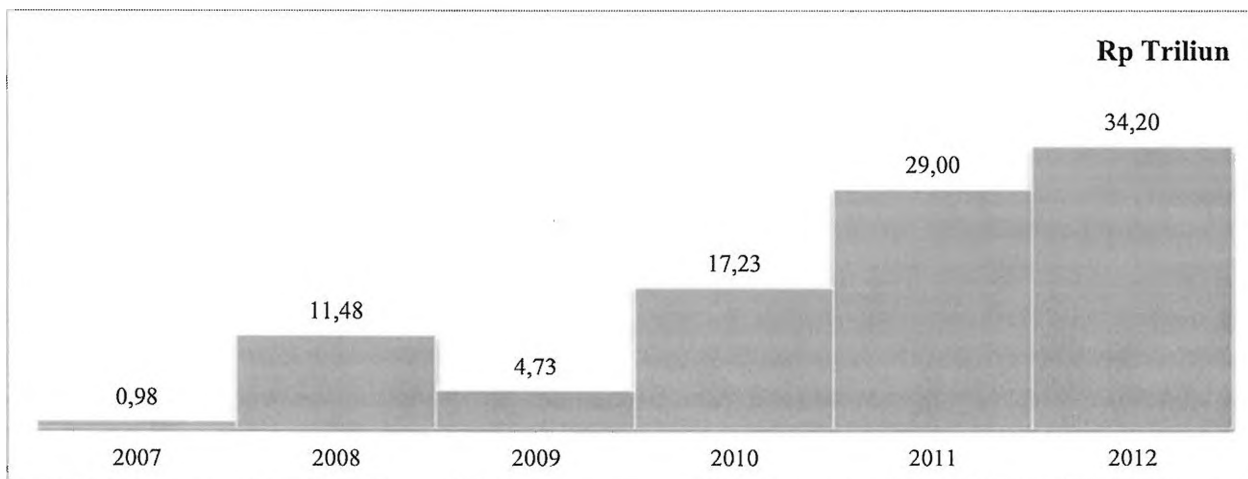
Sementara itu, data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil rapat atau *focus group discussion* dengan para *stakeholders*. Sedangkan data sekunder diperoleh dari laporan realisasi seperti laporan realisasi penyaluran oleh bank pelaksana, laporan realisasi penjaminan dan laporan keuangan perusahaan penjamin kredit, serta data primer lainnya yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga tertentu yang relevan.

IV. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1. Kepentingan Pemerintah

4.1.1. Penyaluran KUR

Sejak program KUR digulirkan pada tahun 2007 sampai dengan Desember 2012, penyaluran KUR secara akumulasi telah mencapai Rp.97,62 triliun. Per tahunnya, penyaluran KUR secara bertahap mengalami pertumbuhan dengan nilai rata-rata 272% per tahun. Pencapaian pertumbuhan ini didorong oleh adanya pertumbuhan di 2008 yang mencapai 1.069% dari tahun 2007, dan dapat dikatakan cukup wajar mengingat program KUR baru dimulai sekitar akhir 2007. Namun, penyaluran KUR pada 2009 mengalami penurunan sebesar 59% dari tahun 2008. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah kualitas penyaluran KUR yang tidak baik di 2007 dan 2008 sehingga terjadi klaim gagal bayar cukup tinggi pada PPK sehingga terjadi penurunan penyaluran KUR, dan adanya kesulitan mencari debitur yang memenuhi persyaratan yang termuat dalam nota kesepahaman bersama tahun 2007 dan addendum pertamanya serta SOP KUR awal.

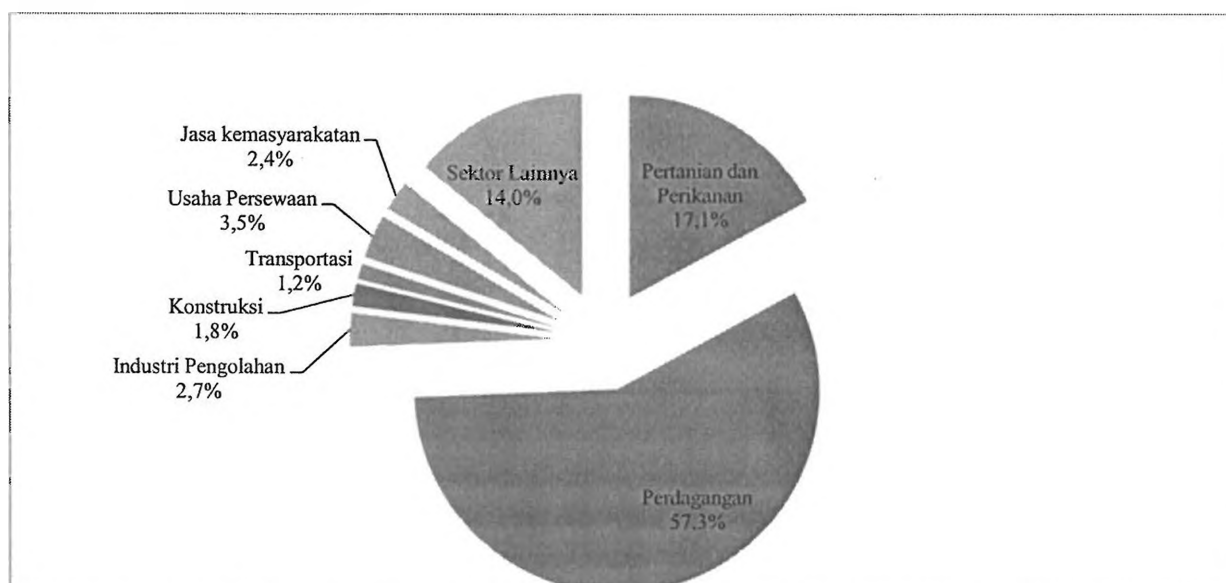


Sumber : Kemenko Perekonomian. 2013. Penyebaran penyaluran KUR 2007-2012, diolah

Gambar 4.1. Realisasi Penyaluran KUR 2007 s.d 2012.

Gambar 4.1 menunjukkan pula bahwa pada periode 2010 s.d 2012, penyaluran KUR secara berturut-turut meningkat, bahkan khusus di 2011 dan 2012, penyaluran KUR melebihi target yang ditetapkan sebesar Rp20 triliun per tahun. Pada tahun 2011, penyaluran KUR mencapai Rp.29 triliun, melampaui targetnya 45% atau sebesar Rp.20 triliun. Pada tahun 2012, pencapaian penyaluran KUR juga melampaui targetnya sebesar 13,3% atau sebesar Rp.34,2 triliun dari target yang ditetapkan sebesar Rp.30 triliun. Pencapaian penyaluran ini disebabkan oleh salah satu faktor diperbolehkannya diadakannya perpanjangan atau suplesi peminjaman KUR.

Dari sisi penyaluran per sektor ekonomi, realisasi penyaluran KUR selama periode 2007 s.d 2012 didominasi oleh sektor perdagangan. Hal ini tergambarkan dalam Gambar 4.2. Proporsi penyaluran KUR untuk sektor perdagangan mencapai 57,3%, disusul kemudian oleh sektor pertanian khususnya sub sektor perkebunan sebesar 16,3%, dan sisanya adalah sektor usaha persewaan 3,5%, industri pengolahan 2,7%, dan lain-lain.



Sumber : Kemenko Perekonomian. 2013. Penyebaran penyaluran KUR 2007-2012, diolah

Gambar 4.2. Realisasi Penyaluran KUR per Sektor 2007 s.d 2012.

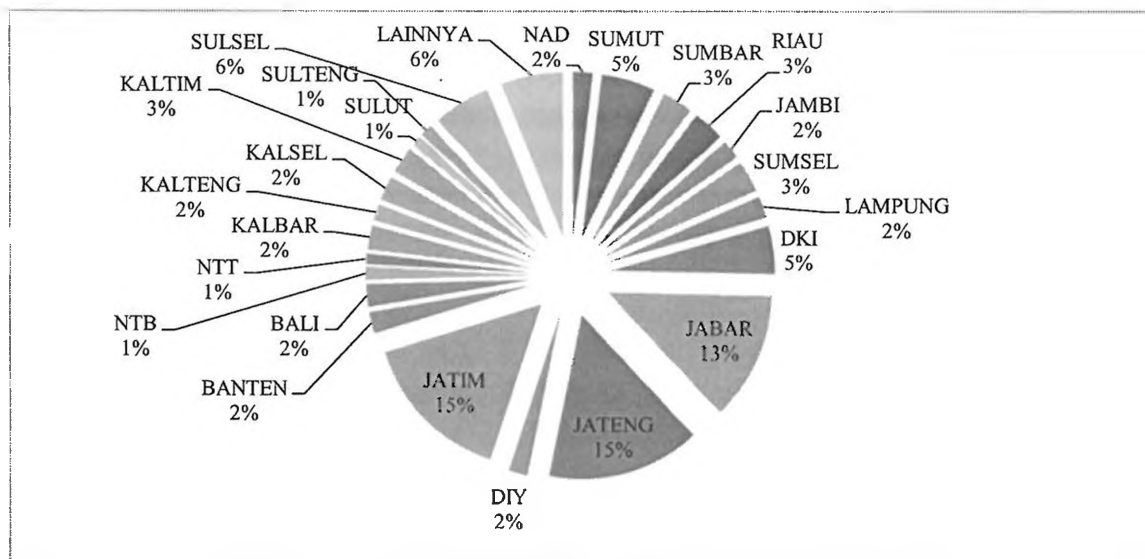
Dominasi penyaluran oleh sektor perdagangan ini tidak terlepas dari karakteristik sektor tersebut yang dipandang oleh bank pelaksana memiliki risiko yang lebih kecil dibandingkan dengan sektor lainnya. Beberapa faktor keunggulan sektor perdagangan dibandingkan dengan sektor lainnya terutama sektor pertanian dilihat dari sisi perbankan antara lain :

Tabel 4.1. Faktor-faktor Risiko Kredit Sektor Perdagangan dan Pertanian

Faktor	Sektor Perdagangan	Sektor Pertanian
Likuiditas	Kas dapat dihasilkan secara teratur dan periodik, misalnya mingguan, bulanan, dan tahunan.	Kas dapat dihasilkan ketika musim panen atau musiman (tergantung jenis tanaman yang ditanam), bisa 3 bulanan untuk padi.
Perubahan Harga	Dapat dengan mudah menyesuaikan diri bila terjadi perubahan harga. Bila harga pasokan naik, pedagang akan menaikkan harga jual dan sebaliknya.	Sulit atau tidak fleksibel. Bahkan harga cenderung turun ketika panen karena <i>supply</i> meningkat. Peningkatan <i>supply</i> sulit dihindari mengingat produksi pertanian harus dilakukan secara serempak (alamiah) untuk mengurangi risiko penyakit, wabah, hama, dan lain sebagainya.
Faktor Alam	Mudah menyesuaikan diri. Bila musim kemarau datang, pedagang bisa merubah barang dagangannya yang cocok dengan musim yang sedang terjadi.	Dapat dikatakan tergantung pada alam. Ketika musim kemarau datang, petani sulit bercocok tanam, terutama tanaman padi.
Sumber Daya Manusia	Cenderung memiliki SDM yang lebih tinggi tingkat pendidikan dan pengetahuannya. Pedagang sudah biasa berhitung untung rugi usaha.	Tingkat pendidikan masih rendah dan cenderung masih menggunakan cara-cara tradisional. Jarang memiliki perhitungan. Di samping itu, Petani sering mempersepsikan program kredit merupakan program Pemerintah yang tidak harus dibayar kembali atau cuma-cuma (<i>moral hazard</i> tinggi)

Sumber : Diringkas dari hasil FGD dengan beberapa *stakeholders*

Sementara itu, bila penyaluran KUR dilihat dari sisi sebaran per wilayah sebagaimana terlihat dalam Gambar 4.3, maka wilayah Jawa mendominasi penyerapan kredit hingga 51,8% selama periode 2007 s.d 2012, dengan rincian terutama Jawa Tengah 15,2%, Jawa Timur 15,1%, dan Jawa Barat 12,7%.



Sumber : Kemenko Perekonomian. 2013. Penyebaran penyaluran KUR 2007-2012, diolah

Gambar 4.3. Sebaran Penyaluran KUR per Wilayah Periode 2007 s.d. 2012.

4.1.2. Debitur dan Tenaga Kerja

Sampai dengan periode 2007 s.d. 2012, debitur yang telah mendapatkan akses KUR sebanyak 7,684,591 debitur. Jika dihitung berdasarkan plafond penyaluran, maka per debitur telah mendapatkan kredit Rp.12,7 juta per debitur. Kinerja pencapaian debitur ini dapat dikatakan sangat baik mengingat waktu yang digunakan hanya ± 5 tahun, dan debitur tersebut merupakan debitur yang secara aturan normal tidak akan mendapatkan kredit.

Sebaran debitur yang telah mendapatkan penyaluran KUR sebagian besar di propinsi Jawa Tengah dengan persentase 23,2%, Jawa Timur 17,3%, dan Jawa Barat 14,2% dari total debitur. Sisanya tersebar di seluruh propinsi Indonesia. Sebaran penyerapan tenaga kerja pun mengikuti sebaran debitur, di mana sebaran sebagian besar tenaga kerja terjadi di daerah propinsi Jawa Tengah 20,2%, Jawa Timur 17,3%, dan Jawa Barat 13,2% dari total tenaga kerja yang diserap. Gambaran sebaran debitur dan tenaga kerja dapat dilihat dalam Tabel 4.2.

Tabel 4.2. Sebaran Debitur KUR dan Tenaga Kerja 2007 s.d. 2012

Wilayah	Debitur (Unit)	Tenaga Kerja (Org)
Jawa Timur	1.328.439	2.031.300
Jawa Tengah	1.784.123	2.365.165
DIY	198.338	477.212
DKI Jakarta	182.436	746.063
Jawa Barat	1.090.436	1.544.501
Sumatera Selatan	140.552	250.057
Sumatera Barat	177.016	127.252
Sumatera Utara	319.250	601.384
Riau	127.970	240.269
Kalimantan Selatan	143.839	185.553
Sulawesi Selatan	428.429	702.322
Bali	182.752	189.783
Provinsi Lainnya	1.581.011	2.252.008
TOTAL	7.684.591	11.712.869

Sumber : Kemenko Perekonomian dan PPK. 2013, diolah

Dilihat dari sisi penyerapan tenaga kerja, penyaluran KUR dilaporkan pula berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja yang dipekerjakan oleh debitur dalam jumlah yang besar. Selama periode 2007 s.d. 2012, tenaga kerja yang terserap mencapai 11.712.869 orang yang tersebar di seluruh wilayah propinsi di Indonesia. Wilayah propinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat merupakan wilayah-wilayah penyerapan tenaga kerja terbesar dengan proporsi masing-masing 20,2%, 17,3%, dan 13,2% dari total tenaga kerja yang diserap.

Berdasarkan gambaran sebaran penyaluran KUR, debitur, dan tenaga kerja yang tidak merata, terfokus pada daerah propinsi tertentu, tidak dapat dilepaskan dari kondisi faktor infrastruktur perbankan dan jumlah UMKMK yang ada. Sebagian besar Bank Pelaksana dan UMKMK berada di Jawa. Jika kondisi demikian terus berlangsung maka distribusi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat akan semakin tidak merata. Untuk itu, Pemerintah Pusat perlu mendorong BPD dan lembaga keuangan linkage setempat untuk berpartisipasi dalam penyaluran KUR.

4.1.3. Pengeluaran APBN

Atas pelaksanaan KUR, Pemerintah mengalokasikan belanja subsidi IJP untuk pembayaran premi penjaminan KUR, dan penambahan modal negara (PMN) untuk peningkatan kapasitas penjaminan KUR. PMN perlu ditambahkan mengingat PT Askrindo dan Perum Jamkrindo merupakan BUMN dengan 100% sahamnya dimiliki oleh Pemerintah. Karenanya berdasarkan ketentuan PMK No.99/PMK.010/2011, penjaminan KUR dianggap sebagai penjaminan kredit produktif sehingga rasio penjaminan kredit dengan ekuitas maksimal 10 kali. Jika lebih dari 10 kali, maka Pemerintah harus menambah ekuitas kedua PPK tersebut.

Sampai dengan periode 2007 s.d 2012, Pemerintah telah merealisasikan total pengeluaran APBN sebesar Rp.9.003,3 miliar, terdiri dari belanja sumbsid IJP sebesar Rp.1.853,3 miliar dan PMN sebesar Rp.7.150 miliar. Rincian pengeluaran PMN terdiri dari PMN pada ekuitas PT Askrindo sebesar Rp.3.631 dan ekuitas Perum Jamkrindo sebesar Rp.3.519 miliar. Adapun perkembangan belanja IJP dan PMN yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3. Perkembangan Belanja IJP dan PMN Pemerintah (Rp. Miliar)

Tahun	IJP	PMN		Total PMN
		PT Askrindo	Perum Jamkrindo	
2007	-	850.0	-	850.0
2008	61.6	-	-	-
2009	143.2	250.0	250.0	500.0
2010	223.2	900.0	900.0	1,800.0
2011	624.2	800.0	1,200.0	2,000.0
2012	801.1	831.0	1,169.0	2,000.0
TOTAL	1,853.3	3,631.0	3,519.0	7,150.0

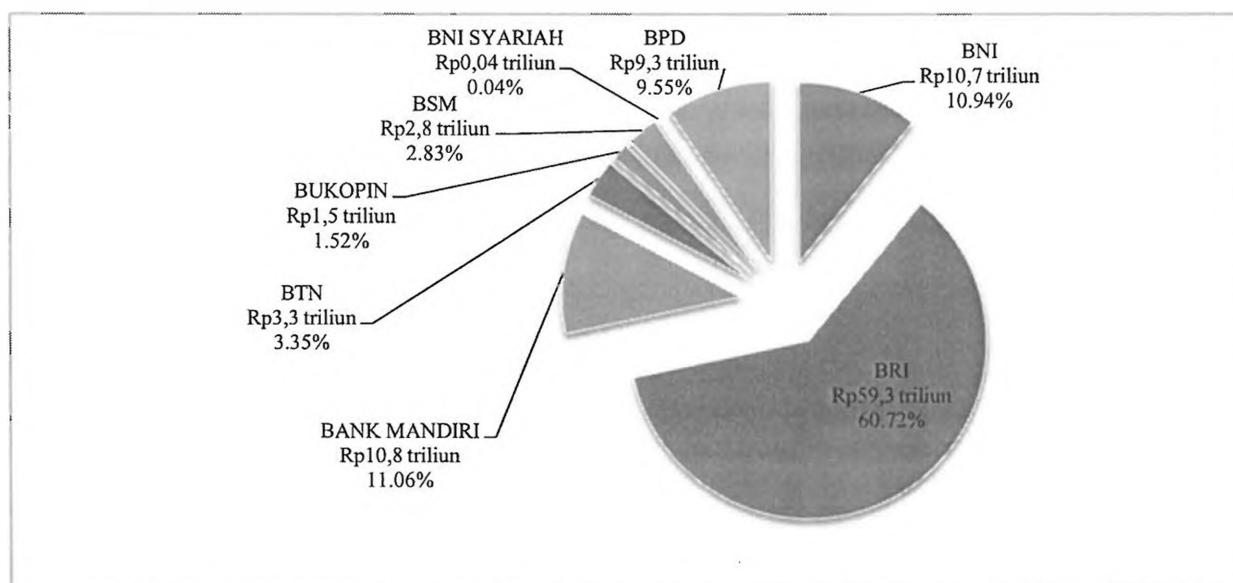
Sumber : PT Askrindo, Perum Jamkrindo, dan Direktorat SMI-DJPB. 2013, diolah

Dari 2 jenis pengeluaran Pemerintah yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan penjaminan KUR tersebut, belanja subsidi IJP dapat dikatakan sebagai biaya sedangkan pengeluaran PMN pada ekuitas kedua PPK bukan biaya melainkan sebagai investasi. Kemudian, jika biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah tersebut dibandingkan dengan pencapaian penyaluran KUR yang sangat baik, nampak bahwa program KUR dapat dikatakan sebagai program yang sukses. Di mana dengan biaya Rp.1.853,3 miliar, Pemerintah dapat menyalurkan kredit sebesar Rp.97.651 miliar kepada 7.684.591 debitur yang *feasible* dan tidak *bankable*, dan mampu meningkatkan kapasitas modal dua BUMN

penjamin kredit. Peningkatan kapasitas akan terus dapat dipergunakan oleh kedua BUMN tersebut meskipun program sudah berhenti di 2014.

4.2. Bank Pelaksana

Selama periode 2007 s.d. 2012, penyaluran akumulasi KUR telah mencapai Rp97,6 triliun. Berdasarkan bank pelaksana sebagaimana digambarkan dalam Gambar 4.4 penyaluran KUR didominasi oleh BRI dengan tingkat persentase 60,72 % yang terdiri dari KUR retail 12,9% dan KUR Mikro 47,8%. BRI merupakan satu-satunya Bank Pelaksana yang menyalurkan KUR Mikro sejak tahun 2007. Setelah BRI, disusul kemudian oleh Bank Mandiri dan BNI dengan kontribusi masing-masing sebesar 11,1% dan 10,9%.



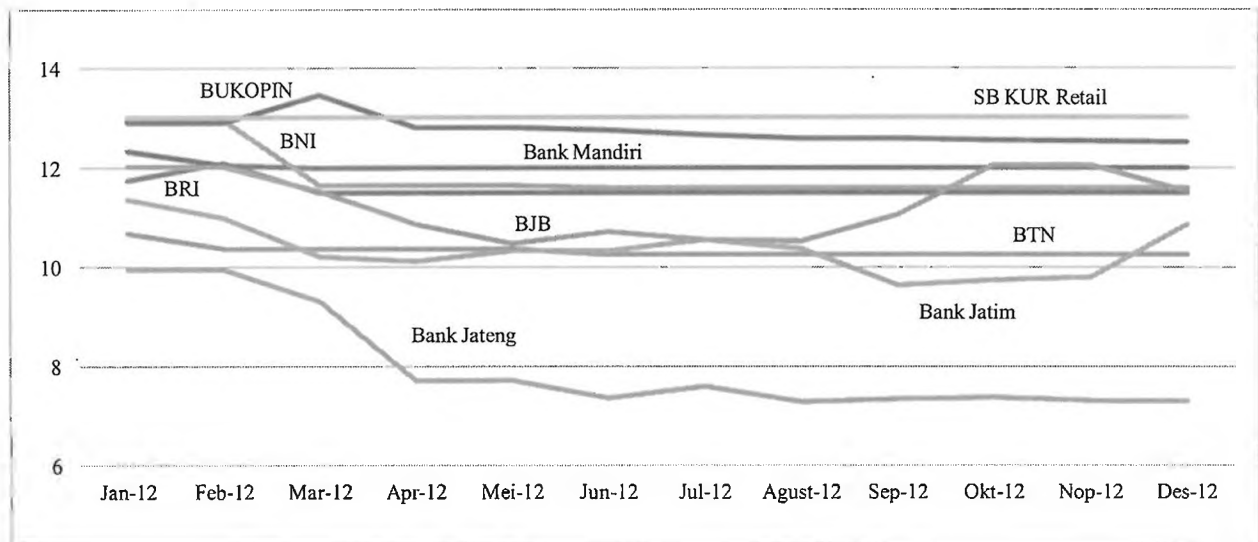
Sumber : Kemenko Perekonomian. 2013. Penyebaran penyaluran KUR 2007-2012, diolah

Gambar 4.4. Sebaran Penyaluran KUR per Bank Pelaksana 2007-2012.

Sebagaimana pada umumnya, atas penyaluran KUR, bank pelaksana mengenakan bunga pada debitur KUR. Untuk KUR Retail dikenakan bunga efektif maksimal sebesar 13%, sedangkan KUR Mikro dikenakan bunga maksimal 22% per tahun. Bila dibandingkan dengan suku bunga dasar kredit (SBDK)² retail sebagaimana terlihat dalam Gambar 4.5, nampak bunga KUR *Retail* yang dikenakan masih di atas SBDK masing-masing Bank. Dengan kata lain, atas penyaluran KUR, Bank Pelaksana mendapatkan keuntungan meskipun dalam SBDK tersebut sudah terdapat margin bebas risiko.

Gambar 4.5 menunjukkan bahwa Bank Jateng memiliki SBDK retail paling rendah dibandingkan dengan bank lainnya, sedangkan BUKOPIN memiliki SBDK retail yang paling besar. Hal ini secara otomatis dapat dikatakan bahwa Bank Jateng memiliki potensi margin yang paling besar yaitu rata sebesar 4,98% per bulan selama tahun 2012, disusul Bank Jatim, BTN dan seterusnya. BUKOPIN pada posisi paling rendah dengan margin 0,25% per bulan meskipun pada periode Maret 2012 mengalami negatif margin sebesar 0,45%.

² Suku Bunga Dasar Kredit menurut SE Bank Indonesia No. 13/5/DPNP merupakan suku bunga terendah yang digunakan sebagai dasar bagi Bank dalam penentuan suku bunga kredit yang dikenakan kepada nasabah Bank. Perhitungan SBDK merupakan hasil perhitungan dari : 1) Harga Pokok Dana untuk Kredit atau HPDK, 2) Biaya overhead yang dikeluarkan Bank dalam proses pemberian kredit, dan 3) Marjin keuntungan (profit margin) yang ditetapkan untuk aktivitas perkreditan. Dalam perhitungan SBDK, Bank belum memperhitungkan komponen premi risiko individual nasabah Bank.



Sumber : Bank Indonesia. 2013. SBDK Oktober 2011 s.d. Maret 2013

Gambar 4.5. SBDK Bank Pelaksana dan Suku Bunga (SB) KUR Retail (%).

Dari sisi adanya penjaminan yang diberikan kepada Bank Pelaksana, penyaluran KUR tentunya memiliki tingkat risiko gagal bayar yang rendah meskipun Bank Pelaksana tetap harus menanggung risiko 20-30% gagal bayar. Dengan kata lain, adanya penjamin dapat mengurangi kerugian gagal bayar bank pelaksana. Tabel 4.4 menggambarkan manfaat adanya penjaminan dalam penyaluran KUR.

Tabel 4.4. Nilai Manfaat Adanya Penjaminan (Rp Juta Kecuali NPL)

Bank Pelaksana	Plafon	NPL (%)	Rugi Gagal Bayar	Manfaat Penjaminan*	Rugi Bank
BNI	10.679.297	7,3	779.589	558.965	220.624
BRI (Ritel)	12.626.671	3,1	391.427	280.653	110.774
BRI (Mikro)	46.670.190	1,7	793.393	568.863	224.530
BANK MANDIRI	10.796.762	2,0	215.935	154.826	61.110
BTN	3.273.465	5,8	189.861	136.130	53.731
BUKOPIN	1.479.878	6,3	93.232	66.848	26.385
BSM	2.761.083	4,9	135.293	97.005	38.288
BNI SYARIAH	41.750	0,0	-	-	-
BPD	9.321.986	6,3	587.285	421.083	166.202
TOTAL	97.651.082	3,6	3.515.439	2.520.570	994.869

Sumber : Kemenko. 2013. Penyebaran penyaluran KUR 2007 s.d 2012

Keterangan : * proporsi penjaminan berdasarkan realisasi akumulasi KUR per akhir 2012, dengan proporsi 17.01% sektor pertanian dan TKI serta 82.99% sektor lainnya.

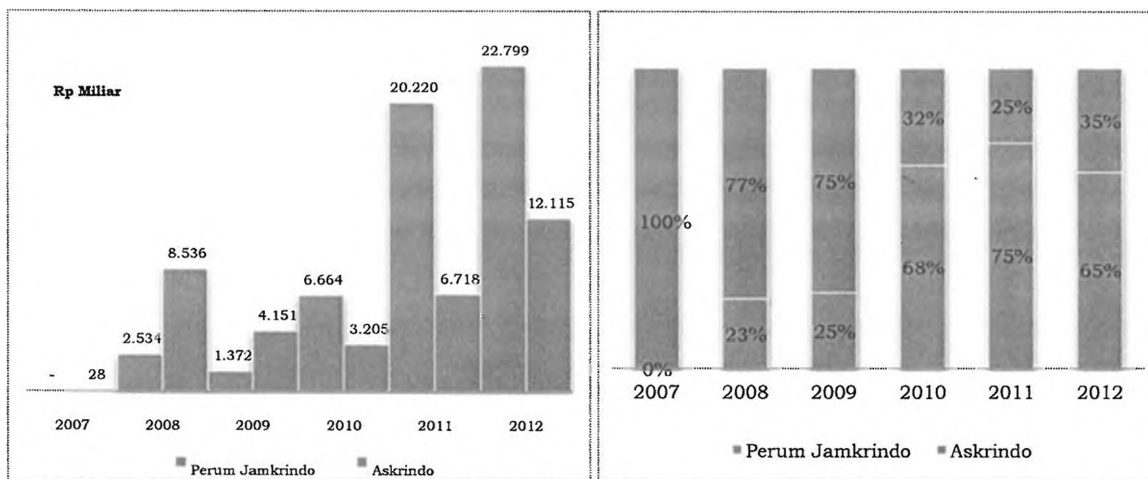
4.3. Perusahaan Penjaminan Kredit

4.3.1. Dampak KUR Terhadap Penjaminan

Selama periode pelaksanaan program dari 2007 s.d. 2012, sebagian besar penjamin KUR dilakukan oleh Askrindo dan Jamkrindo meskipun Jamkrindo baru ikut melakukan penjaminan pada tahun 2008. Sampai dengan akhir 2012, plafon KUR yang dijamin oleh kedua PPK mencapai Rp88.340

miliar dengan rincian Jamkrindo sekitar Rp53.588 miliar dan Rp34.753 miliar. Gambaran perkembangan penjaminan KUR terlihat dalam Gambar 4.6.

Gambar 4.6 menggambarkan pula bahwa pada awal periode pelaksanaan program, tepatnya 2007 s.d 2009, penjaminan KUR sebagian besar dilaksanakan oleh Askrindo. Pada tahun 2007, penjaminan oleh Askrindo mencapai 100%, kemudian mulai turun menjadi 75% pada 2009, dan terakhir menjadi 35% pada 2012. Sejak 2010, penjaminan KUR didominasi oleh Jamkrindo dengan proporsi 68% di 2010, 75% di 2011, dan 65% di 2012. Perubahan dominasi ini terjadi sebagai akibat menurunnya kinerja keuangan Askrindo yang mengalami kerugian pada tahun 2008 s.d. 2010, sehingga terjadi *shifting* penjaminan ke Perum Jamkrindo.



Sumber : Askrindo dan Jamkrindo. 2013, rencana bisnis

Gambar 4.6. Perkembangan dan Persentase Penjaminan KUR 2007-2012.

Kegiatan penjaminan KUR oleh kedua PPK memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kegiatan operasional penjaminan keseluruhan PPK. Secara akumulatif dari periode 2007 s.d. 2012, kontribusi penjaminan KUR mencapai 25,75% untuk Jamkrindo dan 20,26% untuk Askrindo. Gambaran detail perbandingan penjaminan KUR terhadap total penjaminan dan non KUR per tahunnya tergambarkan dalam Tabel 4.5 di bawah.

Tabel 4.5. Perbandingan Penjaminan KUR dan Non KUR oleh PPK (Rp. Miliar)

Tahun	Jamkrindo			Askrindo		
	Non KUR	KUR	Total	Non KUR	KUR	Total
2007	16.816	-	16.816	16.557	31	16.587
2008	21.228	2.534	23.762	25.277	8.536	33.812
2009	24.066	1.372	25.438	18.099	4.151	22.249
2010	27.543	6.663	34.206	20.490	3.205	23.695
2011	34.085	20.220	54.305	21.119	6.718	27.837
2012	30.744	22.798	53.542	35.239	12.115	47.353
TOTAL	154.482	53.587	208.069	136.779	34.756	171.535

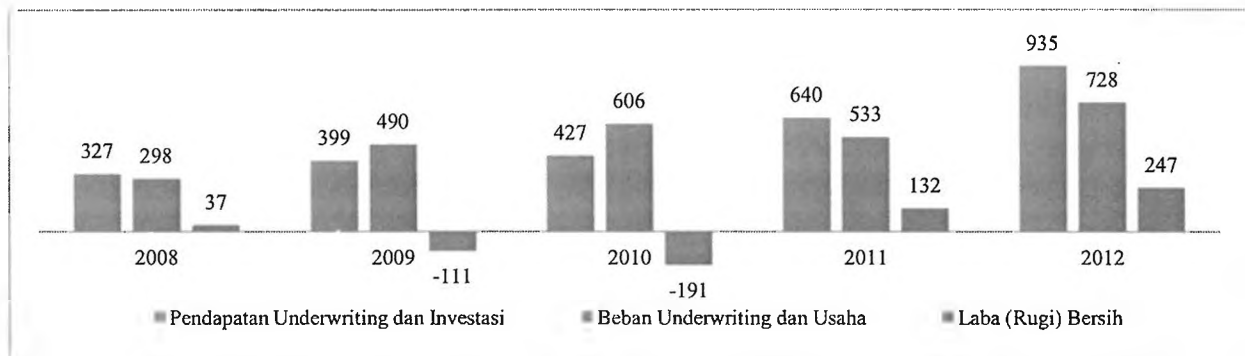
Sumber : Perum Jamkrindo dan PT Askrindo. 2013, diolah

4.3.2. Dampak KUR Terhadap Kinerja Keuangan

Kegiatan penjaminan yang signifikan sebagaimana tersebut di atas secara otomatis berpengaruh terhadap kinerja keuangan khususnya pendapatan dan laba (rugi) yang diperoleh, serta beban operasional yang harus ditanggung oleh kedua PPK yaitu PT Askrindo dan Perum Jamkrindo. Berikut di bawah ini akan diuraikan pengaruh penjaminan KUR terhadap pendapatan, beban operasional, dan laba-rugi bersih PPK.

4.3.2.1. PT Askrindo

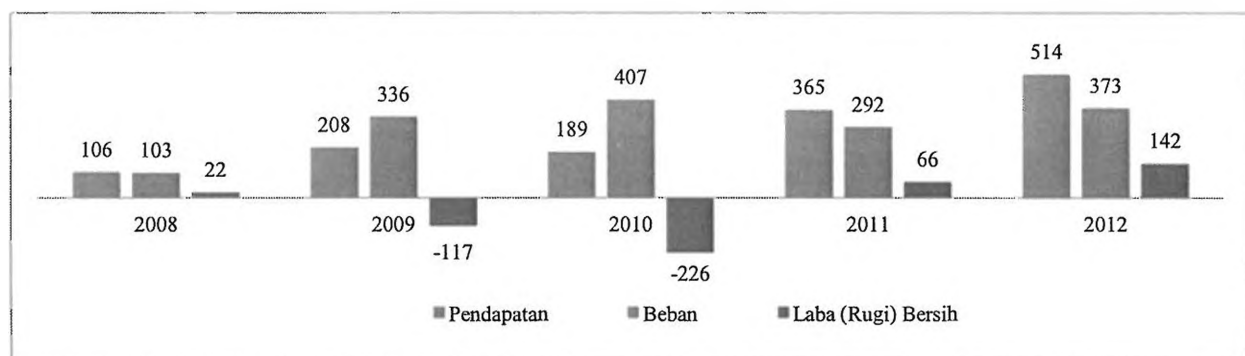
Dalam 2 tahun terakhir, kinerja keuangan konsolidasi PT Askrindo mengalami perbaikan dibandingkan dengan periode 2009-2010 yang merugi. Hal ini terlihat dalam Gambar 4.7, dimana seiring dengan peningkatan penjaminan sebagaimana terlihat dalam Tabel 4.5, baik pendapatan maupun beban perusahaan terus meningkat. Pendapatan tumbuh 26,3% per tahun, dan lebih tinggi dibandingkan dengan bebannya yang tumbuh 25,3% per tahun. Oleh karena itu, laba bersih dapat, di mana pada tahun 2012 dibukukan laba bersih Rp.246,7 miliar, atau meningkat 87,5% dari tahun 2011 yang mencatatkan laba bersih Rp.131,6 miliar.



Sumber : PT Askrindo. 2013. Rencana bisnis, diolah

Gambar 4.7. Ringkasan Laba Rugi Konsolidasi Askrindo (Rp. Miliar).

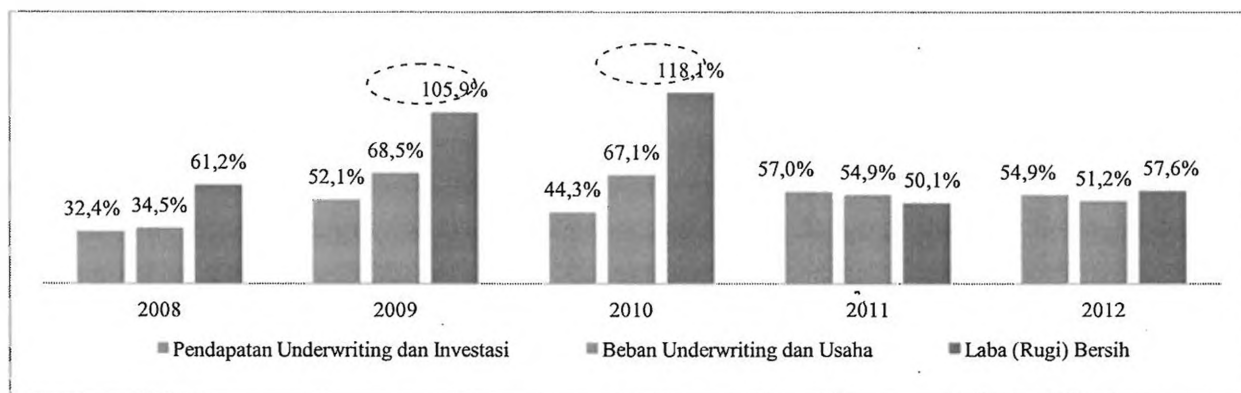
Sementara itu, kinerja keuangan atas penjaminan KUR juga menunjukkan tren perkembangan yang tidak jauh berbeda dengan kinerja keuangan konsolidasi. Hal ini terlihat dalam Gambar 4.8, di mana mencatatkan laba bersih Rp142,0 miliar di 2012 dan Rp.65,9 miliar di 2011, serta di 2 tahun sebelumnya mengalami kerugian. Perbedaannya hanya pada besarnya saja. Namun, jika dihitung secara kumulatif, penjaminan KUR masih mencatatkan rugi bersih sebesar Rp.112,5 miliar selama periode 2008 s.d. 2012.



Sumber : PT Askrindo. 2013. Rencana bisnis, diolah

Gambar 4.8. Ringkasan Laba Rugi Pelaksanaan Penjaminan KUR Askrindo (Rp. Miliar).

Bila kedua kinerja laba rugi tersebut dicermati, nampak bahwa pelaksanaan penjaminan memiliki kontribusi yang sangat signifikan dalam pencapaian laba-rugi konsolidasi. Di mana pada tahun 2011 dan 2012, penjaminan KUR berkontribusi mampu menambah laba bersih yang dicapai. Sebaliknya, pada tahun 2010 dan 2009, penjaminan KUR membuat Askrindo mengalami kerugian. Sebagai data pendukung, Gambar 4.9 menunjukkan kontribusi pendapatan, beban, dan laba-rugi bersih atas pelaksanaan penjaminan KUR terhadap pendapatan, beban, dan laba rugi bersih pengaruh terhadap pencapaian laba rugi konsolidasi Askrindo.

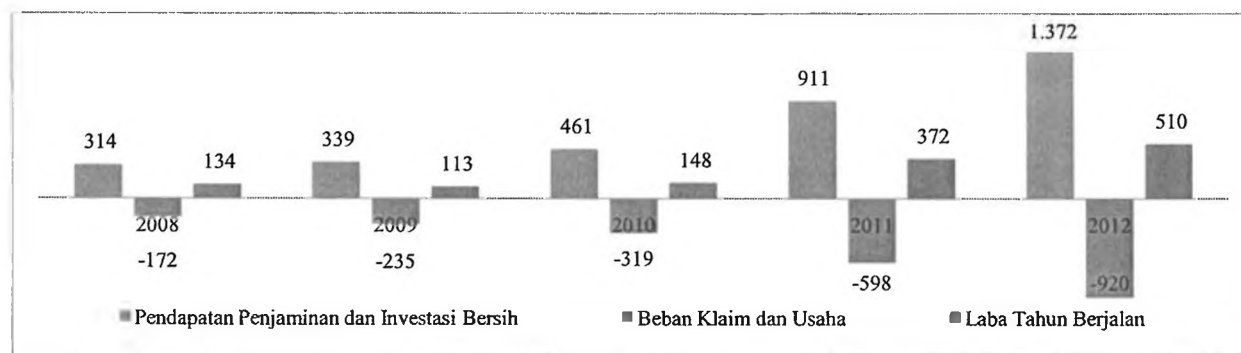


Sumber : Askrindo. 2013. Rencana bisnis, diolah

Gambar 4.9. Kontribusi Penjaminan KUR terhadap Pendapatan, Beban, dan Laba-Rugi Bersih Konsolidasi.

4.3.2.2. Perum Jamkrindo

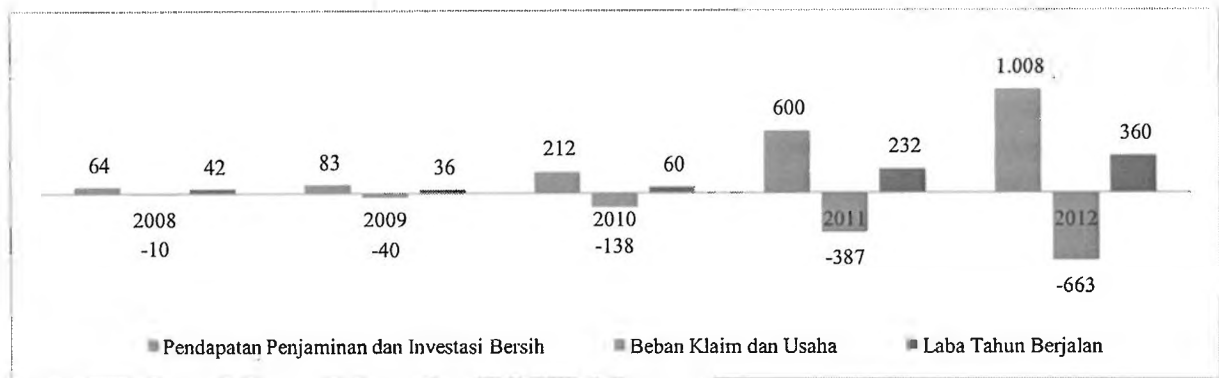
Perum Jamkrindo terlibat dalam penjaminan program KUR sejak tahun 2008 hingga sekarang, dan terus membukukan pendapatan dan laba bersih perusahaan. Selama periode 2008 s.d. 2012, total pendapatan dari penjaminan bersih tumbuh rata-rata 48,1% per tahun, beban klaim dan usaha tumbuh 53,5% per tahun, dan laba bersih tumbuh 50,9% per tahun.



Sumber : Perum Jamkrindo.2013. Rencana Bisnis, diolah

Gambar 4.10. Ringkasan Laba Rugi Konsolidasi Jamkrindo (Rp Miliar).

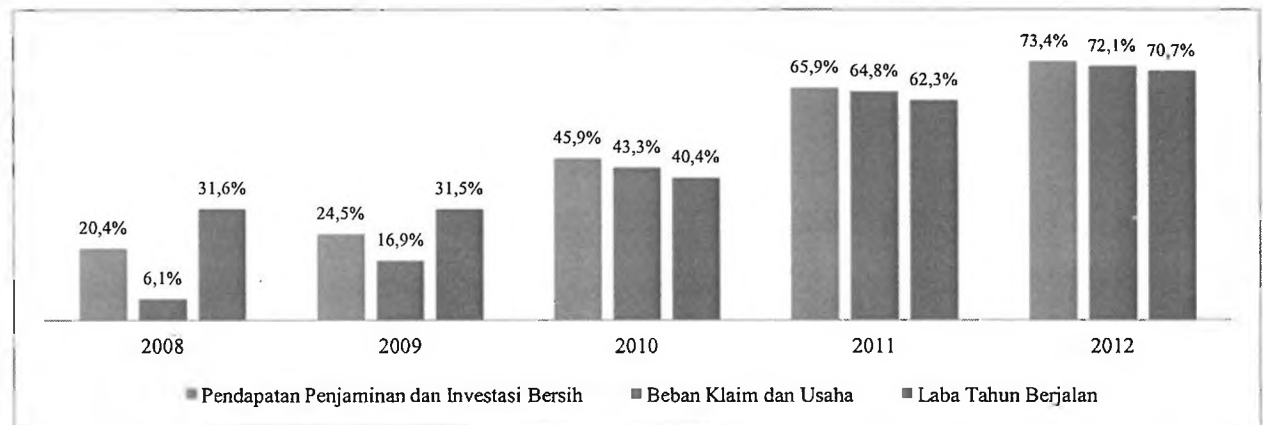
Sementara itu, atas pelaksanaan penjaminan KUR, Perum Jamkrindo juga membubukan kinerja yang positif. Berbeda dengan PT Askrindo yang secara kumulatif masih membukukan rugi bersih Rp.112,5 miliar, Perum Jamkrindo tiap tahunnya membukukan laba bersih yang positif sehingga mencapai laba bersih kumulatif mencapai Rp.738,6 miliar. Gambaran kinerja keuangan atas penjaminan KUR oleh Perum Jamkrindo terlihat dalam Gambar 4.11.



Sumber : Perum Jamkrindo. 2013. Rencana bisnis, diolah

Gambar 4.11. Ringkasan Laba Rugi Pelaksanaan Penjaminan KUR Askrindo (Rp Miliar).

Dari Gambar 4.10 dan 4.11, terlihat pula bahwa pelaksanaan penjaminan KUR berdampak positif terhadap kinerja laba-rugi Perum Jamkrindo. Hal ini terlihat dari kontribusi pendapatan, beban, dan laba bersih atas penjaminan KUR terhadap kinerja konsolidasi Perum Jamkrindo sebagaimana tergambar dalam Gambar 4.12.



Sumber : Perum Jamkrindo. 2013. Rencana bisnis, diolah

Gambar 4.12. Kontribusi Penjaminan KUR terhadap Pendapatan, Beban, dan Laba-Rugi Bersih Konsolidasi.

Seiring dengan peningkatan penjaminan KUR, kontribusi KUR juga meningkat baik dari sisi pendapatan, beban dan laba-rugi bersih. Pada awal-awal tahun mengikuti program, tepatnya tahun 2009 dan 2010, kontribusi pendapatan dan laba bersih relatif lebih besar dibandingkan dengan kontribusi bebannya. Namun, pada periode 2010 s.d 2012, kontribusi pendapatan, beban dan laba bersih dari KUR relatif sama. Hal ini disebabkan oleh kualitas KUR yang dijamin mulai menurun seiring dengan meningkatnya beban klaim penjaminan KUR, dan peningkatan biaya operasional yang disebabkan oleh ekspansi pelayanan atas penjaminan KUR.

V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program KUR selama periode 2007 s.d. 2012 dalam perspektif kepentingan Pemerintah sebagai pemilik program, Bank

Pelaksana, dan Perusahaan Penjamin Kredit dapat dikatakan dapat memberikan manfaat yang positif. Bagi Pemerintah, program KUR mampu menyalurkan kredit sebesar Rp.97.651 miliar kepada 7.684.591 debitur yang feasible dan tidak bankable, dengan biaya sekitar Rp.1.853,3 miliar. Bagi Bank Pelaksana, program KUR masih memberikan pendapatan positif mengingat bunga yang dikenakan masih di atas rata-rata SBDK Bank Pelaksana, dan fasilitas penjaminan yang diberikan oleh Pemerintah melalui PPK dapat menurunkan risiko gagal bayar kredit. Selain itu, dengan adanya program KUR, Bank Pelaksana dapat melakukan penetrasi terhadap pasar debitur baru dengan risiko yang kecil. Sementara itu, program KUR bagi PPM memberikan peningkatan kapasitas penjaminan dan pengalaman untuk jangka panjang meskipun salah satu PPK dalam jangka pendek mengalami kerugian.

Meskipun pelaksanaan program KUR dapat disimpulkan kinerjanya baik, namun pelaksanaan program ini belum dilakukan pengawasan oleh Pemerintah sehingga ada potensi pelaksanaan KUR tidak tepat sasaran. Ketidaktepatan sasaran ini dapat terjadi terutama dalam hal pemilihan debitur KUR oleh Bank Pelaksana karena pendefinisian debitur yang feasible dan not bankable itu tidak jelas dan sulit. Bank Pelaksana memiliki kebijakan sendiri-sendiri dalam menetapkan bahwa calon debitur itu layak untuk KUR atau sebaliknya. Di samping itu, *risk appetite* tim analisis kredit yang dimiliki Bank Pelaksana berbeda-beda, sehingga secara otomatis akan memiliki pandangan yang berbeda dalam memberikan kelayakan bagi calon debitur KUR.

5.2. Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, nampaknya cukup wajar bila menyatakan bahwa program KUR ini layak direkomendasikan kepada untuk Pemerintah melanjutkan program ini setelah tahun 2014 nanti. Namun demikian, sebelum melanjutkan program KUR nampaknya Pemerintah perlu melakukan beberapa hal terlebih dahulu, yaitu : Verifikasi atau pemeriksaan terkait dengan ketepatan penyaluran saat ini, apakah debitur penerima KUR saat ini sesuai dengan sasaran yang telah direncanakan semula, serta mengkaji dampak program KUR terhadap program kredit Pemerintah lainnya seperti KKPE, KUPS, dan lain-lain (program kredit subsidi bunga), apakah terjadi substitusi atau pelengkap. Hal ini bisa terjadi mengingat bunga program KUR lebih tinggi dibandingkan dengan program kredit lainnya sehingga program lainnya tersebut tidak berjalan dengan baik. Secara konsep seharusnya antara program KUR dengan program kredit lainnya tidak terjadi substitusi atau pelengkap mengingat sasaran debitur baik program KUR dan program kredit lainnya berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia. Kredit. Diakses 28 Maret 2013. <http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/00A32509-E25E-4E28-A294-99EEC0B12554/15876/KreditSIPMK1.pdf>.
- , 2013. SBDK periode Oktober 2011 s.d. Maret 2013. Diakses 24 Mei 2013. <http://www.bi.go.id/web/id/Perbankan/Suku+Bunga+Dasar+Kredit>.
- Kementerian Koperasi dan Kecil dan Menengah. (2013). Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (Ukm) Dan Usaha Besar (UB) Tahun 2011 - 2012. Diakses 29 Mei 2013. http://www.depkip.go.id/index.php?option=com_phocadownload&view=file&id=335:data-usaha-mikro-kecil-menengah-ukm-dan-usaha-besar-ub-tahun-2011-2012&Itemid=93.
- Kemenko Perekonomian. (2013). Sebaran Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Periode November 2007-Desember 2012. Diakses 12 Maret 2013. <http://komite-kur.com/article-71-sebaran-penyaluran-kredit-usaha-rakyat-periode-november-2007-desember-2012.asp>.
- , 2012. Standar Operasional dan Prosedur Pelaksanaan KUR.

- Lembaga Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan. (2012). Kelemahan dan Hambatan Koperasi dan UKM. Diakses 29 Mei 2013. <http://lembagalentera.wordpress.com/2012/12/11/kelemahan-dan-hambatan-koperasi-dan-ukm-2/>.
- Menteri Keuangan. (2011). PMK No. Nomor 99/Pmk. 010/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/Pmk. 010/2008 Tentang Perusahaan Penjaminan Kredit Dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit.
- Musrikin W. (2012). Pengertian Kredit. Diakses 8 April 2013. <http://alukmalay.blogspot.com/2012/04/pengertian-kredit.html>.
- Navajaz A.R. (2001). *Credit Guarantee Schemes: Conceptual Frame*. Diakses 17 Maret 2013. <http://www2.gtz.de/dokumente/bib/03-0076.pdf>.
- Perum Jamkrindo. (2013). *Rencana Bisnis Penambahan Modal Negara Untuk Program KUR 2014*.
------. Laporan Keuangan Tahun 2007 s.d 2012.
- PT Askrindo. (2013). *Rencana Bisnis Penambahan Modal Negara Untuk Program KUR 2014*.
------. Laporan Keuangan Tahun Buku 2007 s.d. 2012
- Republik Indonesia. (1998). UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- Sanusi A. (2011). Analisa Karakter Sebagai Salah Satu Alat Manajemen Dalam Pengambilan Keputusan Pemberian Kredit. Diakses 24 Maret 2013. <http://sanoesi.wordpress.com/2011/09/30/analisa-karakter-sebagai-salah-satu-alat-manajemen-dalam-pengambilan-keputusan-pemberian-kredit/>.

